



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CILEGON
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ROBINSAR**
2. Jabatan : **WALIKOTA**
3. NHK : **957474**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	8.060.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 1.860.000.000		
3. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
4. Tanah Seluas 1.300 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000		
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1.350 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.480.000.000
1. MOBIL, LEXUS RX350 H LUKUARY 4X2 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.530.000.000		
2. MOBIL, MERCEDES BENZ C300 AMG W206AT CKD Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	36.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	520.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.096.000.000
III. HUTANG	Rp.	2.418.645.900
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.677.354.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.